JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
e-ISSN: 2777-015X., DOI: https://doi.org/10.52046/jssh.v6i2.233-238
Web: https://journal.tyarlyta.com/index.php/jssh
E-mail: jurnaljssh.ummu@gmail.com
Support By :

Governance of The Rehat (Rumah Hebat Disabilitas) Program in Improving Social Services for Persons with Disabilities in Pasuruan City

(Tata Kelola Program Rehat(Rumah Hebat Disabilitas) dalam Meningkatkan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Pasuruan)

Mukhammad Rifqy Fillah[1]✉ dan Agus Prianto[1]

[1] *Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia.*

✉ Email: rifemoe@gmail.com

Info Artikel : ☑ Artikel Penelitian ☐ Artikel Pengabdian ☐ Riview Artikel
Diterima : 8 Sept 2026 Disetujui : 26 Okt. 2026, Publikasi On-Line : 5 Nov. 2026

Abstract

The shift in social service paradigms from a charity-based model to empowerment-based governance is critical for ensuring equal rights and independence for persons with disabilities. This study analyses the governance of the *Rumah Hebat Disabilitas* (REHAT) programme in Pasuruan City using the five dimensions of R.A.W. Rhodes' Network Governance framework: Interorganizational Networks, Interdependence, Resource Exchange, Trust, and Mutual Adjustment. A qualitative descriptive approach was employed, gathering data through in-depth interviews, direct observations, and document analysis with key stakeholders, including the Social Services Agency, REHAT managers, instructors, and beneficiaries. The findings reveal that REHAT has successfully fostered strong operational synergies, mutual adjustment, and social trust among local government actors and beneficiaries, effectively promoting vocational skills and self-reliance. However, structural governance weaknesses persist, particularly a significant supply chain gap due to the absence of permanent partnerships with the private sector for product marketing, alongside constraints in modern production technology and limited service coverage. To ensure programme sustainability, the study recommends establishing institutionalised Public-Private Partnerships (PPP) with commercial retail networks and expanding municipal funding to modernise production facilities.

🕮 ***Keyword: Empowerment Governance, Network Governance, New Public Service, Public-Private Partnership, Social Services.***

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada dasarnya di bentuk untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama (Ekowanti, 2010) Dulu, negara sering meninjau pelayanan sosial sekedar bantuan seadanya atau gerakan inovatif. Tetapi paradigma *New Public Service* (NPS) mengarahkan birokrasi agar memposisikan warga negara sebagai subjek utama yang berhak atas pemberdayaan(Denhardt & Denhardt, 2015). Kemndirian sosial dan ekonomi pada kelompok disabilitas telah mendorong tata kelola yang modern sehingga saat ini sudah menjadi fokus utama. (Suharto, 2009) (Fahrudin, 2012)

Dalam praktiknya, pemerintah juga tidak bisa menjalankan dan mengurus kelompok disabilitas secara sendiri yang cukup kompleks, maka dari itu adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik antar birokrasi, komunitas, hingga pihak swasta. Untuk mengkaji dinamika partisipasi pada pihak terkait penelitian ini mengarah pada konsep Network Governance dari Rhodes (1996). Rhodes telah menjelaskan bahwa

tata kelola publik saat ini bergerak berdasarkan sistem kerjasama antar organisasi yang saling terkait. Dalam hal ini Rhodes(1996) mengemukakan 5 dimensi penting yang dipakai dalam melihat fenomena ini. Pertama, Interorganizational Networks yaitu bagaimana relasi dan pembagian peran membentuk antar-aktor dilapangan. Kedua, Interdepandence yang melihat ketergantungan antar-pihak (pemerintah butuh data dan partisipasi dari kelompok disabilitas, sementara kelompok disabilitas juga membutuhkan akses modal serta legalitas. Ketiga, Resource Exchange yaitu proses berbagi sumber daya mulai dari anggaran, fasilitas, dan keterampilan vokasional. Keeempat, Trust(kepercayaan) yaitu rasa saling percaya dan berkomitmen agar menjadi perekat kerja sama. Kelima, Mutual Adjusment yaitu berupa kemampuan adaptasi dan kompromi bersama untuk menyelesaikan kendala operasional tanpa hanya terpaku pada aturan birokrasi yang kaku.

Isu mengenai pelayanan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebenarnya sudah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu. Seperti (Nurul & Nurmanina, 2025) dalam penelitiannya telah melihat evaluasi bantuan alat bagi penyandang disabilitas di Samarinda dan menemukan kendala pada pendataan yang masih kurang tertata serta ketiadaan kemitraan jangaka panjang.(Putri, 2023) menganalisis pelayanan bantuan yang terletak di daerah malang dalam persoalaan ini kinerja masih belum optimal dikarenakan persoalaan komunikasi dan keterbatasan sumber daya birokrasi.(Widiyanti, 2024) dalam penelitiannya yang berfokus di Pekanbaru menemukan bahwa urgensi pemberdayaan sebenarnya sudah berjalan cukup optimal, namun persoalan pada pemasaran produk dan kurangnya pendamping menjadikan keberlanjutan program masih terhambat. Pada hal serupa (Sari & Hamid, 2023) mengungkapkan dalam studi pemberdayaan tunanetra di Banjarbaru pelatihan keterampilan telah berhasil menumbuhkan rasa percaya diri pada kelompok disabilitas tetapi pada jaminan perlindungan usaha dan kemandirian ekonomi mereka masih belum sepenuhnya terbentuk. Berdasarkan hal ini penting untuk adanya warga agar terlibat dan modal sosial juga perlu digarisbawahi oleh (Ghina, 2017) sebagai kunci keberhasilan program berbasis komunitas. Sementara itu, (Amansyah, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan vokasional oleh Dinas Sosial Pekanbaru belum diimbangi dengan langkah proaktif birokrasi dalam menggandeng pihak eksternal, khususnya pada pelaku usaha atau sektor swasta. Sejalan dengan hal tersebut, (Sukmana et al., 2023) menekankan pentingnya personalisasi program pelatihan vokasional agar materi dan metode yang diberikan benar-benar selaras dengan karakteristik serta ragam disabilitasnya peserta. Disisi lain (SARI, 2022) juga menyoroti bahwa pemberian bantuan keterampilan menjahit di Riau belum efektif menyelesaikan kerentanan ekonomi peserta, mengingat belum tersedianya saluran pemasaran terintegrasi yang dapat menampung hasil karya tersebut. Peningkatan kapasitas diri dan keberlanjutan fungsi sosial kelompok disabilitas juga sangat ditentukan oleh solidnya kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan temuan (Firdausi & Ananda, 2025) serta (Aminatun & Hidayatullah, 2017)yang menegaskan bahwa sinergi strategis antara instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah terbukti ampuh dalam mengoptimalkan potensi para penerima manfaat.

Jika sebagian besar literatur terdahulu sebatas memotret evaluasi program yang bersifat hierarkis serta hambatan institusional birokrasi, maka penelitian ini mencoba mengambil perspektif baru. Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah pada dinamika jaringan kerja (*Network Governnce)* dalam program REHAT (Rumah Hebat Disabilitas) di Kota Pasuruan. Adapun keterbaruan dari penelitian ini terletak pada bagian topik mengenai bagaimana jaringan kolaborasi ini mengelola rantai pasok pemasaran produk yang di hasilkan oleh karya kelompok disabilitas, sekaligus mereduksi kesenjangan cakupan layanan bagi mereka yang masih belum menerima bantuan dari pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tata kelola pada Program REHAT di Kota Pasuruan berjalan dengan baik dalam meningkatkan pelayanan sosial kelompok disabilitas. Dengan menggunakan pendekatan 5 dimensi yaitu *Interorganizational Networks, Interdependence, Resource Exchange, Trust,* dan *Mutual Adjustment*. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung maupun hambatan pada pelaksanaan program REHAT, terutama pada tata kelola pemasaran produk karya disabilitas dan strategi pemasaran yang selama ini masih belum terlayani.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Rumah Hebat Disabilitas (REHAT) yang beralamat di Jl. KH Mansyur, kelurahan Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Penelitan ini berlangsung selama kurun waktu 3 bulan yang berfokus pada evaluasi dan pemetaan tata kelola pelayanan sosial serta proses pemberdayaan

penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Bahan utama dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara mendalam dengan pengelola program (*in-depth interview*), observasi langsung di lapangan , alat perekam suara, serta dokumentasi. Selain dari sumber primer data pendukung mengandalkan bahan pustaka dan dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, data BPS Kota Pasuruan, profil pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan, serta arsip operasional dan laporan kinerja dari Program REHAT .

Prosedur penelitian ini diawali dengan tahap persiapan yang mencakup studi literatur, pengurusan izin administratif ke instansi terkait, dan penyusunan instrumen pengumpulan data. Adapun tahap pelaksanaan dilanjutkan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara mendalam bersama para informan kunci yang dipilih secara purpusif, meliputi Kepala/Pengelola REHAT, pendamping pelatihan, peserta penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa), serta pihak keluarga. Pengamatan secara langsung juga dilakukan terhadap jalannya kegiatan pelatihan vokasional, pola interaksi pelayanan sosial, serta ketersediaan sarana prasarana penunjang di lokasi penelitian. Keabsahan seluruh data yang dihimpun diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan kredibilitas serta keandalan informasi dari beragam perspektif dan cara pengumpulan .

Analisis data kualitatif deskriptif dalam penelitian ini mengacu pada kerangka interaktif (Miles et al., 1996) yang mencakup tiga tahapan berkesinambungan. Proses ini diawali dengan reduksi data, yakni memilah, mengelompokkan, dan memfokuskan data lapangan hasil wawancara maupun catatan observasi pada substansi jaringan tata kelola, cakupan layanan sosial, serta kendala pemasaran produk (Rhodes, 1996). Selanjutnya, data disajikan secara sistematis melalui narasi deskriptif dan tabel pendukung untuk memperlihatkan dinamika hubungan antar-aktor secara utuh. Yang terakhir pada tahap penutup berupa penarikan kesimpulan serta verifikasi yang dilakukan secara kritis untuk menyimpulkan evaluasi tata kelola Program REHAT di Kota Pasuruan secara akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum dan Pelaksanaan Program REHAT

Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pasuruan mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis santunan (*charity-based*) menuju tata kelola berbasis pemberdayaan (*empowerment-based governance*) yang sejalan dengan prinsip *New Public Service* (NPS). Kehadiran Rumah Hebat Disabilitas (REHAT) yang berlokasi di Jl. KH. Mansyur, Sekargadung, Kota Pasuruan, diresmikan melalui *soft opening* dan *grand opening* pada Desember 2024 sebagai langkah transformasi pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan. Kehadiran REHAT telah mengubah peran penyandang disabilitas dari sekadar penerima bantuan pasif menjadi subjek pembangun yang berhak atas kemandirian dan pengembangan potensi. Oleh karena itu, skema pengelolaannya dirancang secara fleksibel dengan mendasarkan jenis layanan pada minat, ragam disabilitas, serta hasil asesmen awal setiap individu.

Guna memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai pemetaan bidang pelatihan, sasaran peserta, serta bentuk kemitraan yang terjalin, rincian program pemberdayaan di REHAT disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bentuk Kemiteraan

3.2 Analisis tata kelola jaringan (Network Governance)

Penyelenggaraan program REHAT oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dianalisis melalui lima dimensi utama tata kelola jaringan (*governance*) yang dikembangkan oleh R.A.W. Rhodes (1996):

3.3 Jaringan Antarlembaga (Interorganizational Networks)

Pembentukan REHAT merefleksikan terciptanya jejaring kerja publik yang mempertemukan unsur birokrasi, penyedia instruktur, dan kelompok sasaran. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Pasuruan berperan sebagai fasilitator inti dan penyedia fasilitas fisik, yang kemudian diperluas melalui kolaborasi bersama Bagian Humas dan Protokol Pemkot Pasuruan untuk penguatan *soft skill*. Kendati demikian, hasil analisis mendeteksi adanya keterbatasan (*gap*) pada simpul jaringan sektor swasta, mengingat keterlibatan pelaku usaha dalam menampung hasil produksi ke pasar ritel belum terjalin melalui komitmen kemitraan yang mengikat secara permanen.

3.4 Saling Ketergantungan Antarpihak (Interdependence)

Penyelenggaraan program di REHAT berjalan atas dasar keterikatan dan kebutuhan mutual antar-aktor. Efektivitas program Dinas Sosial sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi serta pemetaan aspirasi dari kelompok disabilitas. Di sisi lain, penerima manfaat mengandalkan peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, dukungan pendanaan, dan sarana operasional. Pada tataran praktis, interaksi simbiotik juga terbangun antar-peserta, contohnya kolaborasi antara penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra dalam pembuatan keset kain perca yang memadukan peran fisik serta fungsional untuk saling melengkapi.

3.5 Pertukaran Sumber Daya (Resource Exchange)

Bentuk pertukaran sumber daya di REHAT tecermin dari penggabungan alokasi APBD Kota Pasuruan dan APBN yang disalurkan melalui UPT Kemensos RI berupa bantuan peralatan kerja dan modal operasional. Selain itu, transfer pengetahuan teoretis maupun praktis diberikan oleh instruktur ahli di bidang vokasi dan komunikasi, yang dibalas oleh kelompok disabilitas melalui kontribusi modal sosial berupa dedikasi, waktu, dan kreativitas. Walau demikian, alokasi anggaran daerah yang terbatas masih menjadi penghambat utama dalam menghadirkan teknologi produksi mutakhir bagi calon peserta yang belum terjangkau program.

3.6 Kepercayaan (Trust)

Prinsip kepercayaan berperan sebagai pelekat hubungan antar-aktor yang menggeser pendekatan instruktif birokrasi yang kaku. Melalui pola pelayanan yang ramah, terbuka, dan empatik, stigma negatif peserta terhadap program pemerintah yang berorientasi formalitas berhasil diminimalkan. Pembentukan ruang komunikasi informal dua arah turut menciptakan ikatan emosional dan rasa aman bagi para peserta. Meskipun begitu, kendala sosiokultural masih ditemukan pada tataran domestik, di mana sebagian keluarga atau orang tua masih merasa ragu dan khawatir untuk memberikan izin penuh kepada anaknya untuk terlibat dalam kegiatan REHAT.

3.7 Penyesuaian Bersama (Mutual Adjustment)

Keluwesan tata kelola REHAT ditunjukkan oleh ketiadaan petunjuk teknis kaku, di mana penyusunan materi pelatihan senantiasa disesuaikan dengan hasil asesmen bakat, minat, dan kondisi peserta. Dalam merespons permasalahan rantai pasok (*supply chain*) berupa penumpukan produk karya peserta, pengelola menerapkan langkah penyesuaian adaptif melalui penyelenggaraan pameran mandiri, pemasaran via media sosial, serta pengutamaan penyerapan produk oleh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Secara komprehensif, evaluasi berdasarkan teori Rhodes membuktikan bahwa program REHAT telah meletakkan pondasi *network governance* yang inklusif. Demi menjamin keberlanjutan program dan memperluas jangkauan sasaran (*coverage gap*), fokus perbaikan di masa mendatang perlu dititikberatkan pada penguatan kolaborasi permanen dengan sektor swasta untuk mengoptimalkan saluran distribusi produk.

IV. PENUTUP

Tata kelola Program Rumah Hebat Disabilitas (REHAT) Kota Pasuruan terbukti berhasil mengubah paradigma pelayanan sosial disabilitas dari pola bantuan pasif (*charity-based*) menjadi pemberdayaan mandiri (*empowerment-based*). Ditinjau dari kerangka *Network Governance* R.A.W. Rhodes, kekuatan utama program terletak pada terbangunnya kepercayaan (*trust*), penyesuaian bersama (*mutual adjustment*), dan sinergi operasional antarlembaga birokrasi serta penerima manfaat. Dengan demikian, efektivitas tata kelola masih belum berjalan optimal di akibatkan lemahnya keterlibatan sektor swasta yang menyebabkan terputus pada simpul hilirisasi pasok (*supply chain gap*), dan minimnya sarana teknologi produksi modern, serta belum terbatasnya jangkauan pelayanan

(*coverage gap*) bagi seluruh populasi disabilitas di Kota Pasuruan.

Rekomendasi utama bagi Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah membangun jalinan kemitraan strategis yang mengikat dengan sektor swasta dan jaringan ritel guna mengatasi hambatan hilirisasi hasil karya kelompok disabilitas. Langkah tersebut hendaknya diimbangi dengan perluasan dukungan pendanaan pemerintah lokal untuk mengoptimalkan prasarana teknologi dan keterjangkauan sarana REHAT. Adapun agenda riset selanjutnya dapat diarahkan pada evaluasi model kemitraan *Public-Private Partnership* (PPP) maupun eksplorasi hambatan sosiokultural di tingkat keluarga yang memengaruhi partisipasi kelompok disabilitas.

1. Tata kelola Program REHAT Kota Pasuruan berhasil menggeser paradigma pelayanan disabilitas dari charity-based menjadi empowerment-based governance dengan fondasi trust dan mutual adjustment yang kuat antar aktor.
2. Analisis Network Governance Rhodes menunjukkan adanya coverage gap dan supply chain gap akibat belum adanya kemitraan permanen yang mengikat dengan sektor swasta dan ritel untuk hilirisasi produk karya disabilitas.
3. Keberlanjutan program memerlukan penguatan skema Public-Private Partnership (PPP) dan dukungan teknologi produksi modern untuk memperluas jangkauan layanan.

Pernyataan Penulis

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi dalam penyelesaian naskah akhir. Kontribusi masing-masing penulis adalah sebagai berikut: Mukhammad Rifqy Fillah mengumpulkan data, menyusun draf naskah, melakukan analisis data dan merancang gambar/tabel. Agus Prianto merumuskan gagasan konseptual utama, supervisi penelitian, serta melakukan revisi kritis terhadap artikel. Seluruh penulis mendiskusikan hasil penelitian dan menyetujui naskah akhir untuk publikasi.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik dalam bentuk hubungan komersial maupun finansial, yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian ini.

Penulis menyatakan bahwa tidak ada alat, layanan, atau teknologi kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam pembuatan, penyuntingan, maupun penyempurnaan naskah ini. Seluruh isi yang disajikan merupakan hasil pemikiran intelektual mandiri para penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis. Tidak terdapat hibah khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun nirlaba untuk penelitian ini. Seluruh kegiatan penelitian difasilitasi secara akademik oleh Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan.

Poin-Poin Utama Penelitian

Penulis mencantumkan 3 poin utama hasil penelitiannya sebagai berikut:

Ketersediaan Data dan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola REHAT, pendamping, peserta disabilitas, serta observasi lapangan di Jl. KH. Mansyur, Kota Pasuruan. Dokumen pendukung berupa Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018, UU No. 8 Tahun 2016, dan arsip operasional Dinas Sosial Kota Pasuruan. Data asli dapat diakses dengan permohonan resmi kepada Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai kebijakan yang berlaku dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas informan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial Kota Pasuruan, pengelola Rumah Hebat Disabilitas (REHAT), serta seluruh instruktur dan pendamping atas fasilitasi, keterbukaan data, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian. Peneliti juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada Bagian Humas dan Protokol Pemkot Pasuruan, serta para penerima manfaat kelompok disabilitas dan keluarga yang telah berkenan meluangkan waktu serta membagikan pengalaman berharga kepada peneliti selama peneliti melakukan riset lapangan. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak menjadi kontribusi utama dalam menyukseskan riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amansyah, D. (2021). *Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.

Aminatun, S., & Hidayatullah, A. N. (2017). Pelayanan Sosial Yayasan Ciqal Terhadap

Penyandang Disabilitas. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *6*(3), 269–286.

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.

Ekowanti, M. R. L. (2010). teori administrasi dan metodologi administrasi publik. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, *1*(2), 161–170.

Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama,). *Ghozali, I.(2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, *25*.

Firdausi, F. N., & Ananda, F. (2025). Peran Dinas Sosial Provinsi Riau Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Di Kota Pekanbaru). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, *23*(1), 42–52.

Ghina, N. Y. (2017). *Kampung iklim: Pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). F. Analisis Data. *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah*, 61.

Nurul, N. A. F., & Nurmanina, A. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Alat Bantu Difabel pada Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda: Evaluation of the Implementation of the Assistive Devices Provision Program for Person with Disabilities by the Social and Community Empowerment Office of Samarinda City. *Journal of Community Development and Disaster Management*, *7*(1), 435–450.

Putri, E. A. (2023). *Implementasi Program Pelayanan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Pelayanan Bantuan Dinas Sosial Terhadap Orang orang Berkebutuhan Khusus di Kota Malang)*.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. *Political Studies*, *44*(4), 652–667.

Sari, C. R., & Hamid, I. (2023). Bias Cahaya: Paradoks Pemberdayaan Masyarakat Pada Difabel Netra di Kota Banjarbaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, *2*(3), 213–222.

SARI, D. N. (2022). *Implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 18tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kecamatan tualang menurut perspektif fiqih siyasah*. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.

Sukmana, D., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Pelayanan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Yayasan Biruku Indonesia). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *14*(1), 12–21.

Widiyanti, M. A. (2024). Evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *3*(2), 613–632.

Copyright© 2026. This is an open access article un-der the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/li-censes/by-nc-sa/4.0/)